

21st CENTURY STATECRAFT: DIPLOMASI DIGITAL AMERIKA SERIKAT ERA PRESIDEN OBAMA

Putri Athifah Fitriah¹
Agus Haryanto²

^{1,2} Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Soedirman
Email: agushari.oke@gmail.com

Abstract

The proliferation of information and communication technology has affected on the implementation of diplomatic practice. The rising of internet and social media have made diplomats and foreign policy practitioners easier for taking place in international arena. The gap between United State of America and Arab and Moeslim world has made President Obama to commit to make a more transparent and opened government to international public. To actualize his commitement, State Department of USA initiates 21st Century Statecraft as form of Obama's commitment. This research discusses 21st Century Statecraft as digital diplomacy of USA through the use of technology.

Keywords: 21st century statecraft, digital diplomacy, social media.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi pelaksanaan praktik diplomatik. Maraknya media internet dan media sosial telah membuat diplomat dan praktisi kebijakan luar negeri lebih mudah untuk melakukannya di arena internasional. Kesenjangan antara Amerika Serikat dan Arab dan dunia Moeslim telah membuat Presiden Obama berkomitmen untuk membuat pemerintahan yang lebih transparan dan terbuka ke publik internasional. Untuk mengaktualisasikan komitmennya, Departemen Luar Negeri AS memprakarsai 21st Century Statecraft sebagai bentuk komitmen Obama. Penelitian ini membahas 21st Century Statecraft sebagai diplomasi digital USA melalui pemanfaatan teknologi.

Kata kunci: 21st century statecraft, diplomasi digital, media sosial.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi khususnya di bidang komunikasi dan informasi telah membawa perubahan yang semakin memudahkan penyampaian informasi lintas batas. Penemuan telegram, telepon, dan internet tidak pernah diprediksi akan memberikan kemudahan berupa pengurangan biaya dan peningkatan kecepatan komunikasi antar manusia di masa depan (Funk, 2013, hlm.8). Berbagai kebutuhan termasuk kebutuhan pemerolehan informasi dan komunikasi kemudian melahirkan *platform* media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube yang memiliki tujuan untuk semakin

mempermudah konektivitas dan untuk saling berbagi berbagai hal antar individu.

Kemunculan internet yang menjadi populer di tahun 1990-an menjadi sebuah revolusi besar (Grech dalam Sullaj, hlm.3), yang mana menurut Friedman, internet memainkan peran penting lintas sektor di dunia, memungkinkan setiap orang, di manapun, untuk memiliki akses yang sama terhadap informasi, saling menghubungkan dan melakukan urusan secara langsung dengan orang lain (Adesina, 2016, hlm.176).

Dengan kecepatan yang dimiliki internet, informasi yang berjalan hari ini sama sekali bukanlah hal yang baru (Neumann dalam Archetti, 2010, hlm.3). Informasi yang tersedia

secara luas, *platform* berbagi digital, kemudahan penyimpanan, kemudahan berkomunikasi hampir tanpa biaya dengan pendengar luas tanpa adanya batasan yang mendesain ulang ruang lingkup dan pola interaksi sosial, dan juga proses politik (Archetti, 2010, hlm.3). Selain itu, internet juga berdampak terhadap kebijakan luar negeri negara. Hal ini dikarenakan berita yang tersedia di internet dapat menjadi material dasar kebijakan luar negeri dan menjadi langkah bagi pemerintah untuk berinteraksi satu sama lain, menjadi lebih cepat, mudah tersedia, dan menjangkau berbagai bagian di dunia.

Saat ini teknologi media sosial digital telah menjadi bagian sehari-hari kehidupan manusia. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap praktek diplomasi dan upaya pemerintah dalam meraih perhatian publik mancanegara (*USC Center on Public Diplomacy*). Kemampuan yang ditawarkan oleh media sosial, khususnya dalam menyediakan kemudahan konektivitas, tidak hanya berkontribusi dalam politik internasional dan aktivitas sosial, tetapi juga mencakup upaya dunia internasional dalam penyelesaian isu-isu pemerintahan global dan antarnegara, menghubungkan tiap individu, negara, dan aktor non negara (Funk, 2013, hlm.10).

Dampak perkembangan teknologi terhadap diplomasi saat ini menyebabkan terjadinya perpindahan kementerian luar negeri ke media sosial seperti Twitter, Facebook, dan YouTube, yang sering kali merujuk kepada diplomasi digital (*Weidenfeld-Hoffmann Trust*, 2016). Selama lebih dari dua dekade, diplomasi digital telah menjadi kata kunci dan perbincangan di kalangan praktisi kebijakan luar negeri (*Digital Diplomacy Review*, 2016). Diplomasi digital atau yang juga disebut sebagai *e-diplomacy*, *cyber diplomacy*, atau *twiplomacy* (Bjola dan Holmes, 2015, hlm.35) mengarah pada penggunaan web, teknologi komunikasi dan

informasi, dan media sosial untuk tujuan aktivitas diplomasi dan kebijakan luar negeri (Sandre, 2013, hlm.9).

Melalui media sosial, kementerian luar negeri dan para diplomat mampu menyelesaikan tugas mereka secara lebih baik. Akun-akun blogger dan jurnalis warga yang berpengaruh di media sosial dapat memberikan informasi yang berguna bagi kementerian luar negeri untuk memahami dengan baik atau memprediksi suatu peristiwa yang terjadi di negara lain. Media sosial juga bisa menghadirkan negara di dunia internasional. Selain itu, negara juga dapat menggunakan informasi untuk mengelola reputasi mereka secara lebih baik di dunia internasional (*Weidenfeld-Hoffmann Trust*, 2016).

Kehadiran media sosial telah dirasakan oleh banyak aktor, termasuk negara. Dewasa ini banyak negara di dunia menggunakan momen dan secara aktif mengejar tujuan kebijakan luar negeri mereka dan menampilkan citra positif dengan membuat laman, blog, dan penggunaan saluran media sosial – Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo, Flickr, Google+, dan lain-lain (Adesina, 2016, hlm.177). Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Burson dan Marsteller (2013) yang menyatakan bahwa lebih dari tiga perempat pemerintah (termasuk di dalamnya pemimpin negara) memiliki akun di Twitter, termasuk 45 negara Uni Eropa, dan semua negara Amerika Selatan (kecuali Suriname) memiliki akun resmi di Twitter.

Pemulihan *image* Amerika Serikat di mata dunia internasional menjadi salah satu perhatian Presiden Obama ketika menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Selama delapan tahun kepemimpinan Presiden George W. Bush penilaian terhadap *image* Amerika Serikat menurun drastis sehingga negara tersebut dipandang negatif oleh publik di negara-negara mayoritas Muslim. Anti-Amerikanisme meningkat di dunia Arab dan menyebar dari Nigeria di Barat Afrika hingga

Indonesia di Timur Jauh. Meskipun pemerintah Amerika Serikat telah menggiatkan upaya diplomasi publik yang inovatif untuk menarik simpati publik Muslim, pasca turunnya Presiden Bush, citra Amerika Serikat masih di level rendah (Zaharna, 2009, hlm.1). Di masa pemerintahannya, Presiden Obama berupaya memperluas dan mempercepat komunikasi dengan pendengar mancanegara dengan menempatkan media sosial dan teknologi ke dalam praktek diplomasi publik (Kelly, 2011, hlm.1).

Berdasarkan fakta diatas, tulisan ini mengulas mengenai digital diplomasi yang dilakukan oleh AS. Untuk itu, tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dokumen. Analisis dalam tulisan ini menggunakan teknik triangulasi data.

2. Tinjauan Pustaka

Dengan terjadinya Revolusi Web 2.0 semakin meningkatkan popularitas dari *platform* media sosial, *website*, dan aplikasi digital yang memunculkan diplomasi digital (Bjola dan Holmes, 2015, hlm.36-37). Diplomasi digital atau yang disebut dengan *e-diplomacy* (Holmes, 2013, hlm.1), *cyber diplomacy*, *twiplomacy* (Bjola dan Holmes, 2015, hlm.35) dapat dipahami sebagai perkembangan dari konsep diplomasi publik atau *soft power* (Bjola dan Holmes, 2015, hlm.33 dan 35).

Diplomasi digital mengarah kepada penggunaan *website*, teknologi komunikasi dan informasi, dan media sosial yang dilakukan negara untuk tujuan aktivitas diplomasi, kebijakan luar negeri ataupun permasalahan dalam kebijakan luar negeri (Bjola dan Holmes, 2015, hlm.35 dan Sandre, 2013, hlm.9). Menurut Marcus Holmes, diplomasi digital merupakan strategi dalam mengelola perubahan melalui alat digital dan kolaborasi virtual, yang secara spesifik mengarah kepada teknologi komunikasi dan informasi serta komunitas *online* yang

bergerak dari bawah ke atas (*bottom-up*) dalam kondisi tertentu (2013, hlm.4). Dalam prakteknya diplomasi digital digunakan untuk menjangkau masyarakat, perusahaan, ataupun aktor non-negara lainnya (Bjola dan Holmes, 2015, hlm.38).

Secara spesifik, pengadopsian diplomasi digital (penggunaan media sosial untuk tujuan diplomasi) telah berimplikasi dalam mengubah praktek bagaimana para diplomat berperan dalam manajemen informasi, diplomasi publik, perencanaan strategi, negosiasi internasional maupun manajemen krisis (Bjola dan Holmes, 2015, hlm.4). Diplomasi digital juga telah memberikan bantuan untuk kepentingan negara dalam hal pembuatan, penyebaran, dan pemeliharaan pengetahuan dan informasi melalui teknologi komunikasi dan informasi.

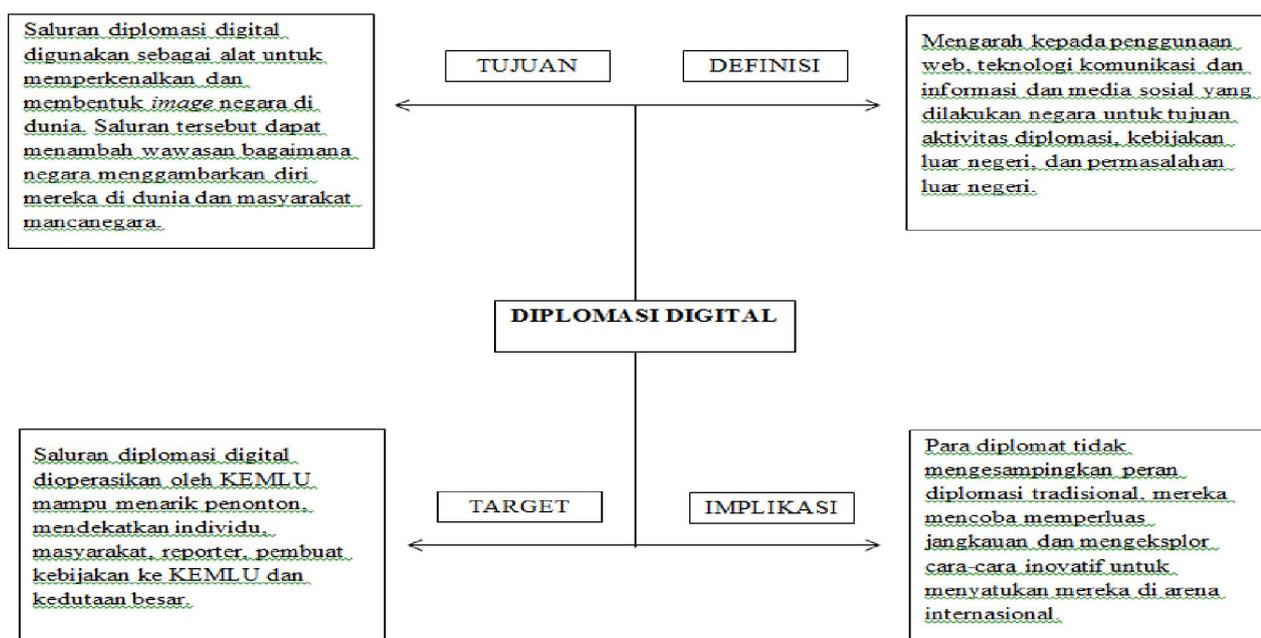
Trend penggunaan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan yang lainnya telah memaksa para diplomat dan praktisi di bidang komunikasi untuk berpikir dan mendesain ulang diplomasi dalam konteks yang berbeda. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa para diplomat tetap memandang diplomasi tradisional selama ini tidak bergeser dari perannya, namun, mereka mencoba untuk memperluas jangkauan mereka dan mengeksplor lebih jauh cara-cara inovatif baru untuk menyatukan upaya mereka dalam arena internasional (Sandre, 2013, hlm.11). Diplomasi digital bisa berkontribusi lebih baik bagi strategi kebijakan luar negeri, baik di level bilateral maupun multilateral, dan bagaimana diplomasi tradisional bisa dilengkapi oleh perangkat baru (DiploFoundation, 2013).

Dengan kemampuan yang ditawarkan oleh media sosial, khususnya dalam menyediakan kemudahan konektivitas, tidak hanya berkontribusi dalam politik internasional dan aktivitas sosial, tetapi juga mencakup upaya dunia internasional dalam penyelesaian isu-isu pemerintahan global dan antarnegara, menghubungkan tiap individu, negara, dan aktor non negara (Funk, 2013,

hlm.10). Kelebihan dari media sosial yang mampu menghubungkan para penggunanya dan menyebabkan terjadinya pertukaran ide lintas wilayah menjadikan media sosial sebagai pengubah alur dasar permainan yang selama ini terjadi, yang mana media sosial memberikan peluang kepada penggunanya

untuk menciptakan komunikasi dua arah (Wilson dan Supa, 2013, hlm.6). Kelebihan tersebut semakin tak terjangkau dengan hadirnya internet yang membuat hal tersebut semakin murah dengan jangkauan yang lebih luas.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Diplomasi Digital



3. Pembahasan

Secara resmi, pemerintah Amerika Serikat telah melaksanakan aktivitas diplomasi publik di awal tahun abad ke-20 ketika Presiden Woodrow Wilson membuat Committee on Public Information untuk menyebarkan informasi secara luas di masa Perang Dunia I. Di tahun 1953, Presiden Eisenhower mendirikan U.S Information Agency (USIA) dalam Reorganization Plan No.8 sebagai otoritas Smith-Mundt Act 1948. USIA berperan untuk mengelola penyiaran dan program informasi (Epstein, 2005, hlm.5-6).

Teknologi komunikasi dan informasi mulai digunakan dalam diplomasi publik Amerika Serikat sebagai bentuk adaptasi dari penerapan teknologi di era USIA untuk mengakomodasi pendapat publik mengenai tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Hayden, 2013, hlm.9-10) di masa pemerintahan Presiden Bill Clinton dengan memindahkan aktivitas USIA saat itu ke dalam platform komputer dan menutup beberapa agen publikasi cetak yang dianggap mahal (Dale, 2010, hlm.2).

Jika di awal pelaksanaannya diplomasi publik ditujukan ke Eropa untuk mempengaruhi publik di masa Perang Dunia I dan II. Di era berikutnya, diplomasi publik

menjadi langkah utama Amerika Serikat di Eropa Timur dan Uni Soviet untuk memenangkan Perang Dingin. Sedangkan di era sekarang, Kongres dan Pemerintah Amerika Serikat menggunakan sarana diplomasi publik untuk mempengaruhi populasi Muslim dan Arab untuk melawan terorisme (Epstein, 2005, hlm.10).

Sejak peristiwa 9/11, diplomasi publik Amerika Serikat mengalami perubahan besar. Pemerintah Amerika Serikat sadar bahwa persepsi internasional memiliki konsekuensi terhadap kondisi domestik secara cepat dan membuat diplomasi publik sebagai isu keamanan nasional. Di saat Amerika Serikat meluncurkan *war on terror*, diplomasi publik menjadi pilihan kedua setelah penyerangan militer dan sebagai instrumen utama dalam pertempuran (Zaharna, 2009, hlm.2).

Presiden George W. Bush di masa pemerintahannya meluncurkan beberapa inisiatif diplomasi yang dinilai paling inovatif sepanjang sejarah Amerika Serikat. Di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri untuk diplomasi publik, Charlotte Beers menyatakan untuk mem-*branding* dan mengkampanyekan Amerika Serikat ke dunia Islam melalui kampanye iklan internasional. Dana sebesar US\$12 juta untuk kampanye di radio, televisi, dan iklan cetak melalui publikasi internet, *lecture tour*, dsb. Hi Magazine (2003) yang merupakan sebuah majalah gaya hidup yang juga memiliki situs web menjadi langkah untuk mempromosikan dialog dengan pemuda Arab. Radio Sawa (2002) menghindari penyiaran berita tradisional seperti yang dilakukan oleh *Voice of America* (VOA) dan berusaha menarik kaum muda Arab melalui campuran musik pop Arab dan Amerika (Zaharna, 2009, hlm.2). Selain itu, munculnya Menteri Luar Negeri Colin Powell dalam MTV di bulan Februari 2002 menjadi diplomasi publik Amerika Serikat yang sangat terlihat. Dalam acara tersebut Powell menjawab pertanyaan dari berbagai pemuda di dunia mengenai gambaran Amerika.

Tanyangan tersebut ditonton oleh 375 juta di 63 negara (Epstein, 2005, hlm.10). Pada tahun 2004, Amerika Serikat meluncurkan stasiun televisi satelit berbahasa Arab, yakni Al-Hurra untuk melawan kepopuleran Al-Jazeera dan Al-Arabiya (Zaharna, 2009, hlm.2).

Di masa pemerintahan Barrack Obama, diplomasi publik Amerika Serikat mencerminkan apa yang telah dipelajari negara tersebut sebelumnya dalam berkomunikasi dengan dunia Arab dan Islam. Amerika Serikat terlihat berupaya menjangkau masyarakat internasional dan khususnya dunia Muslim. Di masa ini juga, Amerika Serikat berusaha menjadikan *listening and engagement* sebagai fokus utama dalam cara untuk saling menghormati dan memahami. Dalam beretorika juga diminimalisir agar tidak terdengar menuntut dan konfrontatif. Citra diplomasi publik Amerika Serikat menjadi lebih terbuka dibanding sebelumnya (Zaharna, 2009, hlm.4).

Di masa pemerintahan Presiden Obama pula, diplomasi internet mampu memainkan peran yang unik, di mana alat diplomasi lainnya tidak bisa meningkatkan dominasi dalam tujuan kebijakan luar negeri. Pemerintah Obama telah meningkatkan hubungan Amerika Serikat dengan negara lain dan mengembalikan citra negara tersebut yang sempat pudar di masa Presiden George W. Bush. Pemerintah Obama mencari cara yang lebih efektif dengan memperbaharui laman pemerintah, menambah jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan Myspace dan mempopulerkan teknologi informasi internet dalam penerapan diplomasi internet. Hal ini dapat memberikan pengaruh kepada persepsi publik mengenai citra nasional Amerika Serikat (Jiang, 2013, hlm.30-31).

Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menyadari bahwa penggunaan saluran media sosial dapat menjadi cara untuk mempengaruhi persepsi publik (Jiang, 2013, hlm.30). Diplomasi digital pertama kali digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat

sebagai sarana diplomasi publik, namun di tahun 2013 mulai banyak negara yang mengikuti langkah Amerika Serikat (Russia Direct, 2013). Meskipun tren penggunaan media baru oleh pemerintah Amerika Serikat telah dimulai sejak awal tahun 1990-an, yang pada saat itu internet muncul dan menjadi alat keseharian di dunia bisnis dan rumah. Diskusi mengenai penggunaan teknologi baru oleh Departemen Luar Negeri sebagai cara untuk memanfaatkan kapasitas internet agar lebih efektif dalam keterlibatannya di dalam masyarakat telah ada sejak satu dekade yang lalu (Dale, 2010, hlm.2).

Kemunculan diplomasi digital – penggunaan media sosial oleh kementerian luar negeri– diprakarsai oleh Alec Ross, seorang penasihat senior bidang inovasi Departemen Luar Negeri di bawah kepemimpinan Hillary Clinton yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dari tahun 2009 hingga awal 2013. Ross bertanggung jawab untuk mempromosikan penggunaan media sosial dalam bidang kenegaraan Amerika Serikat. Dirinya berpendapat bahwa proliferasi teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya merubah cara protes sosial, namun juga merujuk kepada munculnya revolusi diplomasi: “Secara tradisional, seruan diplomasi termasuk di dalamnya interaksi pemerintah-ke-pemerintah. Sebagai contoh, yang sebelumnya dari pemerintah ke masyarakat, seperti siaran internasional di abad ke-20. Dengan kemajuan media sosial dan peningkatan pesat penetrasi teknologi *mobile*, namun, saat ini keikutsertaan semakin meningkat dari pemerintah ke masyarakat dan masyarakat ke masyarakat. Hubungan langsung dari masyarakat ke pemerintah memperkenalkan diplomat untuk bertemu dan berhubungan dengan pendengar non tradisional, dan sebaliknya memperkenalkan masyarakat untuk mempengaruhi pemerintah mereka untuk melakukan hal tertentu yang pada sepuluh tahun yang lalu merupakan hal

yang tidak mungkin untuk dilakukan” (Paris, 2013, hlm.1-2).

Pada dasarnya, Amerika Serikat telah menyebutkan mengenai diplomasi digital *21st Century Statecraft* yang dikembangkan di bawah pengawasan Hillary Clinton (Kersaint, 2010, hlm.174) di hari pertamanya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Posner dan Ross dalam Chinn, 2011, hlm.1). Seperti yang diungkapkan oleh Clinton bahwa: “Kami telah mengadaptasi pengelolaan negara kami dengan membentuk kembali pengembangan dan agenda diplomatik untuk mempertemukan tantangan lama dengan cara yang baru dan dengan menyebarkan aset inovasi terbaik Amerika. Ini adalah *21st Century Statecraft*: pelengkap bagi kebijakan luar negeri tradisional dengan instrumen yang telah diadaptasi dan diinovasi yang mampu memberikan pengaruh bagi jaringan, teknologi, dan demografi di dunia yang saling berhubungan” (Kersaint, 2010, hlm.174).

Kebijakan *21st Century Statecraft* ini merupakan usaha Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam melaksanakan komitmen Obama mengenai transparansi di pemerintahan dan untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah di luar negeri melalui penggunaan teknologi baru dan alat diplomasi tradisional untuk mendorong pemerintah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel (Department of State of USA, 2010, hlm.65). Tindakan ini sesuai dengan komitmen Obama di hari pertamanya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dengan menandatangani memorandum “*Transparency and Open Government*” (Transparency and Open Government: Memorandum for the Heads of Executive Department Agencies dalam Dale, 2010, hlm.4) yang di dalamnya tercantum bahwa teknologi Web 2.0 merupakan sebuah kebutuhan untuk masuk ke dalam pengetahuan yang lebih luas di berbagai komunitas di dunia (Newcombe dalam Dale, 2010, hlm.4). Hal ini menjadi sangat jelas bahwa pemerintahan Obama memiliki keinginan untuk memasuki

pengetahuan dari masyarakat di berbagai penjuru dunia.

21st Century Statecraft mempunyai tujuan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah pendekatan diplomasi tradisional yang bersifat *top-down* menjadi berpusat kepada warga dan pemberdayaan bisnis (Kersaint, 2010, hlm.174) membuat lebih banyak hubungan dengan masyarakat internasional dan mendapatkan respon secepat mungkin dari masyarakat melalui media sosial (Chinn, 2011, hlm.1). Dalam konteks ini, Departemen Luar Negeri melaporkan telah menggeser stafnya ke arah penggunaan media sosial seperti Twitter, YouTube, dan Facebook. Negara mendedikasikan sebuah situs web kompleks yang secara menyeluruh sebagai inisiatif untuk *21st Century Statecraft* dan berbagai dimensinya: kebebasan internet di dunia dan pembinaan *Civil Society 2.0* sebagai cara untuk memperkuat masyarakat sipil yang difasilitasi oleh teknologi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan peningkatan pelayanan publik, stabilitas, dan keamanan. Kemudian, upaya ini juga bertujuan untuk mengabdikan inovasi melalui kelembagaan penyedia pelatihan termasuk di dalamnya penanganan media (Kersaint, 2010, hlm.174-175).

21st Century Statecraft menjadi pendekatan bagi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk merangkul teknologi dan alat baru serta menggunakannya untuk berhubungan dengan pendengar baru, khususnya masyarakat sipil. Revolusi di bidang teknologi konektivitas—termasuk di

dalamnya internet, SMS, media sosial, dan meningkatnya aplikasi *mobile* yang semakin canggih dan telah diakses lebih dari 4.6 milyar telepon genggam yang digunakan saat ini—telah memberikan manusia alat baru untuk menyerukan dan membuka cakrawala baru bagi diplomasi. Teknologi tersebut menjadi *platform* untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berdagang di abad ke-21. Dan yang lebih penting, teknologi telah menghubungkan masyarakat ke masyarakat, pengetahuan, dan jaringan global (Department of State of USA, 2010, hlm.65).

Dalam implementasinya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menggunakan bentuk komunikasi baru ini pada level kedutaan dan pemerintah pusat di Washington. Di satu sisi kedutaan berupaya untuk merangkul media sosial dengan menargetkan pendengar melalui ketertarikan publik. Dan di sisi lain, pemerintah pusat membuat forum-forum, di mana para pengguna dapat berinteraksi dengan pejabat pemerintah dengan *mem-posting* pandangan mereka pada isu-isu diplomasi, bertanya mengenai aktor pemerintah dan *citizen* lain. Departemen-departemen di D.C. dan kedutaan besar di berbagai negara dinilai sebagai pemimpin dalam menggunakan media sosial untuk kepentingan pemerintahan (Chinn, 2011, hlm.2).

Dalam beberapa bulan terakhir, Departemen Luar negeri Amerika Serikat di bawah pimpinan Clinton telah melakukan serangkaian tindakan mengenai inisiatif *21st Century Statecraft*.

Tabel 1. Program-program yang Dijalankan Berdasarkan Inisiatif *21st Century Statecraft*.

Nama Program	Penjelasan
<i>Nowruz Video</i>	Presiden Obama merilis sebuah video di YouTube pada bulan Maret, yang menampilkan dirinya berbicara secara langsung kepada publik dan pemimin Iran pada peringatan Nowruz, perayaan Tahun Baru Iran. Obama juga menyebutkan mengenai sejarah hubungan Amerika Serikat-Iran yang bergejolak dan menyambut 'awal yang baru' dengan Iran. Video tersebut telah dilihat lebih dari 100.000 kali dan diterima dengan baik di Iran.

Nama Program	Penjelasan
<i>Swat Text</i>	Pasca pasukan Taliban mengambil alih Lembah Swat di Pakistan pada bulan Mei, Amerika Serikat berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi sebesar US\$100 juta. Tidak hanya sampai di situ, Sekretaris Clinton juga mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam bantuan tersebut dengan mengirim “ <i>swat</i> ” ke <i>shortcode</i> 20.222 melalui telepon genggam. Melalui tindakan tersebut maka warga Amerika secara otomatis telah memberikan sumbangan sebesar US\$5 ke UN <i>Refugee Agency</i> .
<i>Virtual Student Foreign Service</i>	Dalam pidatonya di bulan Mei pada upacara wisuda di Universitas New York, Sekretaris Clinton mengumumkan sebuah inisiatif baru yang mampu menghubungkan mahasiswa Amerika dengan Kedutaan Amerika Serikat di luar negeri, dan memberdayakan para siswa untuk bertindak sebagai diplomat dengan terlibat secara langsung dengan masyarakat mancanegara.
<i>Cairo Speech</i>	Selang beberapa waktu diluncurkannya <i>21st Century Statecraft</i> di bulan Mei oleh Sekretaris Clinton, Presiden Obama menyampaikan pidato yang sangat diharapkan di Kairo yang berisikan hubungan antara warga Amerika Serikat dan warga Muslim di seluruh dunia. Dalam upaya menyebarkan Presiden Obama menyebutkan untuk meningkatkan hubungan antara Amerika Serikat dan Arab sebaik mungkin, lembaga pemerintah Amerika Serikat menggunakan berbagai aplikasi internet, termasuk situs jaringan sosial, podcast, dan siaran langsung Webcast di situs web Gedung Putih. Pesan teks dan <i>update</i> Twitter mencapai lebih dari 20.000 pengguna dunia (Associated Press dalam Dale, 2010, hlm.4).
<i>Twitter in Iran</i>	Pada bulan Juni terjadi kasus penculikan terhadap ribuan warga Iran yang menentang pemerintah setempat telah menyebabkan rakyat Iran menyebarkan seruan, gambar, dan video melalui <i>platform</i> Twitter untuk menentang penindasan yang telah dilakukan oleh pemerintah mereka yang sebelumnya telah mengontrol media tradisional. Tindakan tersebut mendapatkan bantuan langsung dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai upaya mendukung kebebasan informasi. Seperti yang diungkapkan oleh Jared Cohen yang berkerja sama dengan Alec Ross dengan menghubungi Jack Dorsey dari Twitter untuk tidak membungkam demonstran Iran yang online di platform tersebut.
<i>Congo</i>	Pada bulan September, Alec Ross mengunjungi bagian timur Kongo yang merupakan area konflik berbahaya di era modern. Ross kemudian memiliki ide-ide baru untuk melakukan inisiatif. Pertama, melalui teknologi canggih: sistem mobile banking untuk memudahkan pemerintah dan organisasi internasional untuk membayar tentara mereka tanpa bergantung kepada pengiriman tunai yang tidak bisa diandalkan. Kedua, teknologi rendah, di mana Departemen Luar Negeri memberikan bantuan dengan menempatkan mantan kombatan di saluran radio dengan menggunakan suara kredibel untuk berbicara langsung dengan anggota misil dan mendorong mereka untuk menghentikan aksi mereka.
<i>Cuba</i>	Langkah baru yang dilakukan oleh Pemerintahan Obama dalam menjalin hubungan dengan Kuba dengan melibatkan beberapa prinsip <i>21st Century Statecraft</i> —dengan kemudahan akses remitan dan berkurangnya larangan perjalanan bagi warga Kuba Amerika sehingga mendorong terjadinya dialog <i>people-to-people</i> . Selain itu, sanksi terhadap telekomunikasi Kuba juga mulai diturunkan dengan mengizinkan kabel bawah laut dan operator ponsel untuk melakukan bisnis di Kuba sehingga akan memberdayakan individu melalui teknologi komunikasi dan informasi.
<i>Mexico Initiative</i>	Hasil kerja sama antara Departemen Luar Negeri, pemerintah Meksiko, perusahaan telekomunikasi Meksiko, dan organisasi non-profit Meksiko mengenai tantangan kekerasan narkoba di wilayah perbatasan dan kesulitan yang dialami

Nama Program	Penjelasan
	warga setempat untuk melaporkan kasus secara anonim ke polisi. Kerja sama kemitraan ini kemudian membuat SMS gratis dengan menggunakan kode pendek yang dapat digunakan warga Meksiko untuk memberikan laporan secara anonim terkait kasus narkoba yang selanjutnya dipublikasikan ke dalam database publik yang ditindaklanjuti oleh polisi setempat.
<i>Humari Awaz</i>	Dalam pidatonya di Islamabad pada bulan Oktober, Sekretaris Clinton mengumumkan dukungan yang diberikan Amerika Serikat untuk jaringan sosial <i>mobile phone</i> yang bermarkas di Pakistan, yakni Humari Awaz yang berarti “suara kita”, yang dapat diakses melalui kode pendek SMS secara gratis di lima jaringan mobile. Tujuan dari penggunaan jaringan ini di Pakistan adalah untuk sosial, bisnis, media, pertanian, dan lain sebagainya. Pemerintah Amerika Serikat membayar 24 juta pesan teks pertama yang dikirim melalui Huwari Awaz. Program ini dianggap sukses dengan setengah dari teks yang terkirim telah digunakan dalam beberapa minggu pertama.
<i>Civil Society 2.0</i>	Sekretaris Clinton telah meluncurkan sebuah inisiatif baru bertajuk <i>Civil Society 2.0</i> dalam kunjungannya ke Marrakesh, Maroko. Program tersebut didanai oleh Departemen Luar Negeri dan juga dengan mendatangkan para ahli untuk mempermudah organisasi akar rumput melalui penggunaan teknologi agar lebih efektif.
<i>Shanghai Townhall</i>	Dalam kunjungan terakhir ke Tiongkok, Presiden Obama mengadakan pertemuan di balaikota di Shanghai untuk berbicara dengan sekelompok mahasiswa. Perbincangan tersebut tidak disiarkan secara luas sehingga Obama menyinggung mengenai permasalahan penyensoran online di Tiongkok sebagai hal yang mengganggu dan memberdayakan pemuda Tiongkok untuk tidak memiliki pejabat pemerintah yang meminta mereka untuk melakukan apa yang para pejabat inginkan.
<i>Addressing Afghans</i>	Dalam pidatonya di Afghanistan pada bulan Desember, Presiden Obama sangat sedikit warga Afghanistan yang memiliki akses langsung ke televisi maupun internet (kecepatan <i>broadband</i> sekitar 2 persen), sehingga Gedung Putih mengambil langkah berdasarkan fakta di mana sekitar 30% warga Afghanistan memiliki ponsel sehingga potongan video berdurasi 45 detik dari pidato Obama yang berbicara kepada warga setempat dengan menggunakan bahasa Arab, Pashto, dan empat bahasa lain yang digunakan di Afghanistan.
<i>Texting Haiti</i>	Dalam beberapa jam setelah gempa yang mengguncang Port-au-Prince, Haiti, Departemen Luar Negeri telah berhasil berkoordinasi dengan mGive, sebuah <i>platform</i> sumbangan <i>mobile</i> untuk membuat kode pendek sehingga warga Amerika dapat memberikan donasi sebesar US\$10 dengan mengirimkan pesan teks. Dalam beberapa hari, satu juta orang telah mengiri pesat teks “HAITI” ke 90.999, dan mencapai lebih dari US\$10 juta bantuan Palang Merah.

Sumber: NDN, 2010.

Di masa pemerintahannya, Obama telah mencerminkan beberapa perubahan besar dalam bidang digital, di mana publik dapat mengkonsumsi berita dan informasi serta terlibat dengan dunia sekitar secara online. Pada tahun 2009, selain meluncurkan Whitehouse.gov, RSS dan email, pemerintah Obama juga bergabung ke media sosial

lainnya dengan memiliki akun di Facebook, Twitter Flickr, Vimeo, iTunes, dan bahkan MySpace. Pada tahun 2011, pemerintah Obama juga meluncurkan *We the People*, sebuah *platform* bagi warga Amerika Serikat untuk mengajukan petisi ke Gedung Putih. Pada tahun 2013, Ibu Negara mem-*posting* foto pertamanya di Instagram. Pada tahun

2015, Presiden Obama mengirim *tweet* pertamanya melalui akun @POTUS. Pada tahun 2016, Gedung Putih mulai mengirim cerita resmi melalui Snapchat. Dengan demikian, saluran digital yang merupakan aset ini tidak hanya milik presiden ke depannya, tetapi juga untuk masa presiden setelahnya. Dan hal ini tentu juga milik rakyat Amerika Serikat (Digital Gov, 2016).

4. Kesimpulan

Di masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat berupaya meningkatkan hubungan negara tersebut dengan negara lain dan mengembalikan citra nasional yang sempat pudar, khususnya dengan publik Arab dan Muslim di masa Presiden George W. Bush. Untuk itu, Presiden Obama berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan terbuka terhadap publik mancanegara. *21st Century Statecraft* menjadi wujud komitmen Obama yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di bawah *Secretary State* Hillary Clinton.

21st Century Statecraft menjadi pendekatan bagi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dengan merangkul teknologi dan peralatan baru dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan masyarakat sipil. *21st Century Statecraft* mencerminkan cara Amerika Serikat untuk mengubah pendekatan diplomasi tradisional melalui penggunaan teknologi dengan membuat hubungan seluas mungkin dengan publik internasional dan mendapatkan tanggapan secara cepat dari publik melalui media sosial.

Daftar Pustaka

Buku:

- Bjola, Corneliu dan Holmes, Marcus. 2015. *Digital Diplomacy: Theory and Practice*. London and New York: Routledge.
- Sandre, Andreas. 2013. *Twitter for Diplomats*. Jenewa dan Roma: DiploFoundation and Istituto Diplomatico.

Artikel Jurnal:

- Adesina, Olubukola S. 2016. Foreign Policy in an Era of Digital Diplomacy. *African Journal for the Psychological Study of Social Issues Vol.19, No.3*.
- Hayden, Craig. 2013. Engaging Technologies: A Comparative Study of U.S. and Venezuelan Strategies of Influencing and Public Diplomacy. *International Journal of Communication 7*.
- Wilson, Drew dan Supa, Dustin W. 2013. Examining Modern Media Relations: An Exploratory Study of the Effect of Twitter on the Public Relations – Journalist Relationship. *Public Relations Journal Vol.7 No.3*.

Sumber Internet:

- Digital Diplomacy Review. 2016. *Digital Diplomacy Rating 2016*.
<http://digital.diplomacy.live/> (diakses pada 30/03/2017).
- Digital Gov. 2016. *The Digital Transition: How the Presidential Transition Workd in the Social Media Age*.
<https://www.digitalgov.gov/2016/11/02/the-digital-transition-how-the-presidential-transition-works-in-the-social-media-age/> (diakses pada 31/03/2017).
- DiploFoundation. 2013, 10 Februari. *Twitter for Diplomats: A Guide to the Fastest Growing Digital Diplomacy Tool*.
<https://www.diplomacy.edu/blog/twitter-diplomats-guide-fastest-growing-digital-diplomacy-tool> (diakses pada 13/12/2016).
- NDN. 2010. *Refelctions on 21st Century Statecraft*.
<http://ndn.org/category/topic/21st-century-statecraft> (diakses pada 27/03/2017).
- Russia Direct. 2013. *Trends in Social Media in 2013*.
<http://www.russia-direct.org/analysis/trends-social-media-2013> (diakses pada 30/03/2017).

- Sullaj, Paula. *Digitalization of Diplomacy: A New Way of Making Diplomacy?* www.unikore.it/.../8912_5a2880fa3c9e2ba85bf7ece2c0f08f81 (diakses pada 27/03/2017).
- USC Center on Public Diplomacy. *Introducing the Digital Diplomacy Bibliography*. <https://uscpublicdiplomacy.org/publication/digital-diplomacy-bibliography> (diakses pada 07/02/2017).
- Weidenfeld-Hoffmann Trust. 2016. *What is Digital Diplomacy?* <http://whscholars.org/2016/01/what-is-digital-diplomacy/> (diakses pada 07/02/2017).
- Sumber Lainnya:**
- Archetti, Cristina. 2010. Media Impact on Diplomatic Practice: An Evolutionary Model of Change. *Paper presented at American Political Science Association (APSA) Annual Convention Washington DC*.
- Burson dan Marsteller. 2013. Twiplomacy: Heads of State and Government on Twitter, July 2013. Twiplomacy.
- Chinn, Jacquelyn Nicole. 2011. Communicating 21st Century Statecraft: Evaluating the Paradigm Shift Argument. *Thesis*. Texas A&M University.
- Dale, Helle C. 2010. Public Diplomacy 2.0: Where the U.S. Government Meets “New Media”. *The Heritage Foundation No.2346*.
- Department of State of USA. 2010. Leading through Civilian Power: The First Quadrennial Diplomacy and Development Review.
- Epstein, Susan B. 2005. U.S. Public Diplomacy: Background and the 9/11 Commission Recommendations. *CRS Report for Congress*. The Library of Congress.
- Funk, Julianne Quinn. 2013. The Power of riending: How Social Media is Impacting International Relations in the Twent-first Century, *Disertasi*, University of St. Andrew Skotlandia.
- Holmes, Marcus. 2013. What is e-Diplomacy?. *Makalah*, dalam European Consortium for Political Research General Conference in Bordeaux, Prancis.
- Jiang, Xiaoying. 2013. U.S. Internet Diplomacy on China. *Thesis*. Aalborg University and University of International Relations.
- Kersaint, Maite. 2013. Exploring Public Diplomacy 2.0: A Comparison of German and U.S. Digital Public Diplomacy in Theory and Practice. *Disertasi*. European University Viadrina Frankfurt.
- Paris, Roland. 2013. The Digital Diplomacy Revolution: Why is Canada Lagging Behind?. *Paper*. Canadian Defence and Foreign Affairs Institute (CDFAI).
- Zaharna, R. S. 2009. Obama, U.S. Public Diplomacy and the Islamic World. *World Politics Review*.